

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM *REUSE, REDUCE, DAN RECYCLE* (3R)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PELITA
HARAPAN KELURAHAN BALLAPARANG KECAMATAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**



Disusun dan diusulkan oleh :

KIKI FITRIA

Nomor Stambuk : 105611112516

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM *REUSE, REDUCE, DAN RECYCLE* (3R)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PELITA
HARAPAN KELURAHAN BALLAPARANG KECAMATAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)



08/03/2021

1 exp
Sub-Alumni

R/0002/ADN/21 CD
FIT

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program *Reuse, Reduce dan Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Kiki Fitria

Nomor Induk Mahasiswa : 1056 1111 2516

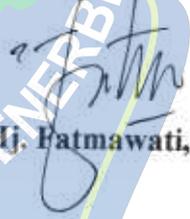
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

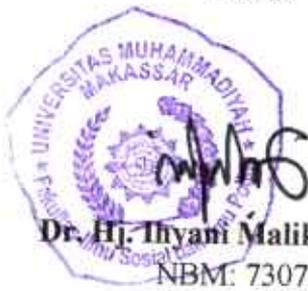

Dr. Muhammad Isa Ausari, M.Si

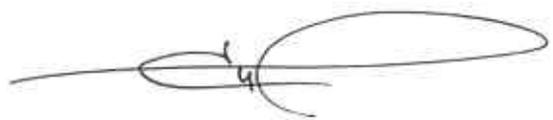

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

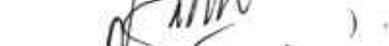
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021.



1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

()

2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

()

3. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kiki Fitria
Nomor Stambuk : 10561 11125 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul : Implementasi Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 28 November 2020
Yang menyatakan


Kiki Fitria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Reuse, Reduce, Recycle (3R) Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan. Ballaparang Kecamatan. Rappocini Kota Makassar”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Said dan Ibunda tercinta Tati yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Bapak Dr. Isa Ansari, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak NasrulHaq, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir. Tak lupa teman-teman yang selalu memberikan motivasi Indah, Ariska, Dewi, Wiwit, Rusdi, Siti dan Hafiz serta teman-teman seperjuangan Federasi 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak dan semangat untuk berjuang mencapai Toga.

Pihak UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar dan pihak Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Kakanda tercinta dan terbaik Zainal Abidin beserta Adinda tercinta Muhammad Aldi dan Tasya Putri Lestari, terima kasih atas dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 28 November 2020


Kiki Fitria

ABSTRAK

Kiki Fitria, Muhammad Isa Ansari, Hj. Fatmawati. Implementasi Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi. Bank Sampah Pelita Harapan telah beroperasi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut sampai saat ini di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Program 3R di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dalam Implementasi Program 3R di Bank Sampah Pelita Harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program 3R di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar secara umum telah cukup baik namun sepenuhnya belum terlaksana dengan optimal ditinjau dari aspek: (1) Komunikasi, komunikasi berupa sosialisasi kegiatan 3R berjalan belum cukup baik karena masih kurang sarana dan prasaran yang mendukung jalannya kegiatan 3R. (2) Sumber Daya, (3) Disposisi/Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Bank Sampah Pelita Harapan, Program 3R*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan data.....	43
F. Teknik Analisis data.....	44
G. Teknik Pengabsahan Data.....	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum kota Makassar.....	47
2. Profil Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang.....	

Kecamatan Rappocini Kota Makassar	48
3. Profil UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar	51
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	75
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah Nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Sampah juga merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Permasalahan sampah semakin kompleks akibat dua hal berikut yaitu sampah yang tidak terangkut dan pembuangan sampah liar. Ini di akibatkan karena peningkatan jumlah sampah yang tidak di ikuti oleh perbaikan sarana dan prasarana mengenai penanganan sampah.

Bukan hanya kesehatan yang memiliki dampak negative, tetapi kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan laut juga terkena dampaknya. Penanganan sampah dalam mengurangi, mengumpulkan, memudahkan, menyimpan sementara, mengelola dan menimbun sampah merupakan masalah yang harus di hadapi oleh pemerintah kota dan harus di fikirkan oleh elemen masyarakat. Kurangnya kepedulian mengenai penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dilihat dari kecilnya anggaran yang disediakan. Sementara itu masyarakat secara umum belum menunjukkan adanya indikasi (pertanda) kearah penanganan sampah secara mandiri dan

Sampah Kota Makassar. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali Kota Makassar No. 63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Menurut data dari wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk sekitar 800 BSU yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun dalam perjalanannya, tidak semuanya dapat bertahan sampai sekarang, yang aktif sekarang hanya sekitar 25% atau sekitar 200 BSU.

Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) merupakan cara yang terpilih untuk mengelola dan menangani sampah sesuai dengan permasalahan yang ada. Penerapan program ini juga merupakan solusi yang diambil untuk pengelolaan sampah, disamping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (PLTSA; Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Bahkan pengelolaan sampah dengan program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kegiatan sehari-hari dilingkungan sekitar. (3R) terdiri atas *Reuse, Reduce, Recycle*. *Reuse* berarti memanfaatkan kembali sampah atau bahan yang dibuang atau bahkan tidak dipakai lagi untuk mencegah terjadinya penumpukkan sampah dilingkungan sekitar. *Reduce* berarti upaya untuk mengurangi segala sesuatu atau timbunan-timbunan yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah atau bahan yang tidak lagi digunakan menjadi sesuatu yang baru dengan berbagai proses sehingga menjadi lebih bermanfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 mengenai Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce, dan Recycle* melalui bank sampah, karena bank sampah merupakan salah satu program pemerintah pusat yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara lengkap dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehingga sehat bagi masyarakat dan juga aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Bank sampah juga merupakan kegiatan yang bersifat *social engineering* yang mengarahkan masyarakat untuk memilih berbagai macam sampah serta membangkitkan kesadaran diri masyarakat dalam pengelolaan sampah secara cermat agar bisa mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank sampah juga dapat menumbuhkan kesadaran terhadap kelompok masyarakat untuk mendaur ulang, memilah dan memanfaatkan sampah, karena walaupun menjadi bahan yang tidak terpakai sampah memiliki nilai jual yang cukup baik jika sudah diolah menjadi suatu yang berguna. Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) ini juga bertujuan untuk menertibkan wilayah masing-masing dan juga memperbaiki kualitas lingkungan Kota Makassar.

Dalam program ini yang menjadi prioritas utama kegiatannya adalah pengelolaan sampah. Melalui bank sampah yang saat ini berjumlah 78 titik di kota Makassar, di harapkan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah persampahan. Berangkat dari hal ini penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program *Reuse, Reduce,*

Recycle (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan. Ballaparang Kecamatan. Rappocini Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah ?
2. Bagaimana Sumber Daya Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah ?
3. Bagaimana Disposisi/Sikap Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah ?
4. Bagaimana Struktur Birokrasi Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah.
2. Ingin mengetahui Sumber daya Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah.
3. Ingin mengetahui Disposisi/Sikap Keberhasilan Implementasi Kegiatan *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah.
4. Ingin mengetahui Struktur Birokrasi Keberhasilan Implementasi Kegiatan

Reuse, Reduce dan Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi akademik guna menambah khazanah informasi dan kelimuan studi Ilmu Administrasi Negara khususnya menyangkut persoalan penanganan sampah mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi Negara yaitu implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini mampu memberukan masukan-masukan dan saran bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam program *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan. Ballaparang Kecamatan. Rappocini Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan material sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi sampah yang berdampak pada kesehatan, lingkungan atau estetika. Selain itu, pengelolaan sampah ini dilakukan untuk memperbaiki sumber daya alam (*resources recovery*). Dalam pengelolaan sampah kita juga bisa melibatkan zat cair, padat ataupun radioaktif dengan menggunakan proses dan keterampilan khusus untuk jenis zat masing-masing.

Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) perlu dimaksimalkan. Selain menghemat biaya pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi tumpukkan sampah yang berserakan disekitar tempat tinggal, dan juga dapat membantu dalam pengelolaan sampah secara dini dan cepat. Program (3R) sangat berperan penting dalam mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) karena sampah yang terkumpul di TPS 3R bisa diproses langsung sesuai dengan pengolahannya masing-masing.

Penelitian ini akan mengangkat judul "*Implementasi Program Reuse, Reduce, Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan. Ballaparang Kecamatan. Rappocini Kota Makassar*" yang akan dilakukan di wilayah Kota Makassar. Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Implementasi Program 3R melalui Bank Sampah. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis.

1. Penelitian yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Yohanes Nanda Setiawan berjudul *“Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dengan Program 3R Reduce, Reuse, Recycle (Studi Evaluasi Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.21/PRT/M/2006/ Di Kelurahan Jember Kidul, Kebonsari, Jember Lor, Kabupater Jember)”*. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2013. Mengambil tema mengenai pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dengan menggunakan program 3R. Dalam penelitian Yohanes Nanda Setiawan permasalahan yang dibahas adalah masalah berjalannya program *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* tentang pengelolaan sampah semaksimal mungkin yang berawal dari sumbernya. Berdasarkan latar belakang yang ada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan sampah dengan program 3R. Fokus penelitian menggunakan metode teknologi program 3R dalam petunjuk pelaksanaan DAK Sub Bidang Sanitasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.
- Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut bahwa program 3R untuk sistem pengkomposan, perwadahan dan daur ulang sampah skala rumah tangga bisa

dikatakan tepat, akan tetapi untuk sinkronkan dengan jurnal dan Kementerian Pekerjaan Umum masih belum terlaksana secara keseluruhan karena masyarakat hanya melakukan metode tersebut dengan sepengetahuan mereka bahkan tidak pernah memahami tentang standarisasi dalam metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang di keluarkan oleh PU dalam juklaknya. Sedangkan bantuan alat mesin pencacah sampah organik yang diberikan bagi warga untuk melaksanakan metode pengkomposan terlihat tidak berjalan dengan semestinya atau dapat dikatakan tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan tersebut.

2. Penelitian yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Narwan Tasdir dengan judul "*Analisis Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Makassar*". Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2016. Mengambil tema mengenai kebijakan bank sampah karena bank sampah merupakan instrumen multi aspek bukan hanya ekonomi dan lingkungan tetapi juga berbagai fungsi strategis seperti fungsi sosial. Selain itu mekanisme kerja bank sampah yaitu dengan pemilihan sampah, penimbangan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, pencatatan dan hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan dan pembagian hasil. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat dipetik adalah terlaksananya seluruh indikator

implementasi mengenai pelaksanaan bank sampah pada setiap bank sampah yang menjadi informan dalam penelitian ini dengan pelaksanaan teknisnya yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi masih terdapat kelemahan pada indikator implementasi kebijakan bank sampah yaitu mengenai pemilihan sampah dan pembagian hasil penjualan sampah dengan nasabah yang masih beragam antara bank sampah yang satu dengan bank sampah yang lainnya. Selain itu hadirnya bank sampah juga dapat menjadi solusi baru dari penanganan masalah persampahan yang ada di Kota Makassar dengan meninggalkan paradig lama yang hanya berkuat pada sistem kumpul, angkut dan buang.

3. Penelitian yang ketiga adalah skripsi Husnul Khatimah dengan judul skripsi *“Evaluasi Program Pengelolaan Bank Sampah Unit Mawar Merah di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”*. Program studi Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Mengambil tema mengenai pengelolaan bank sampah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bank sampah yang terjadi di Makassar khususnya di Kelurahan Tamalanrea. Selain itu mengevaluasi jalannya pelaksanaan bank sampah karena evaluasi memiliki indikator-indikator yang menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program yang telah tercapai, dan juga menentukan apakah terdapat manfaat dari program tersebut dan menentukan kesuksesan keseluruhan pelaksanaan program yang dijalankan. Bank sampah juga merupakan salah satu program yang hendaknya di evaluasi secara rutin

sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kendala suatu program terlaksana khusus di pengelolaan bank sampah. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat dipetik adalah menganalisis kondisi ideal normatif dengan kondisi actual empiric dari pelaksanaan atau penerapan program mengenai bank sampah di Kota Makassar, terdapat lima indikator yaitu penyerahan sampah ke bank sampah unit kelurahan tamalanrea indah, pemilihan sampah ke bank sampah untuk kelurahan tamalanrea indah pengelola melakukan pemilihan sesuai jenis sampah lalu dibersihkan, penimbangan sampah disini petugas harus rutin melakukan penimbangan dari nasabah yang setiap kali datang, pencatatan dimana terlaksana sesuai prosedur hasil penimbangan dan pengangkutan sampah ke bank sampah pusat.

B. Konsep dan Teori

a. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam (Usman, 2004) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Menurut Syaukani dkk (2004) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna

mengerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2003) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran

dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di sepakati. Selain itu fokus utama kebijakan dalam negara modern adalah dengan melakukan pelayanan dengan segala bentuk tindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Dalam berbagai literatur banyak terdapat definisi mengenai apa yang di maksud dengan kebijakan, masing-masing

definisi memberikan penekanan yang berbeda mengenai arti dari kebijakan tersebut.

Menurut Mustopadidjaja (2003) istilah kebijakan biasa digunakan untuk kegiatan pemerintah, bahkan kebijakan juga merupakan suatu keputusan organisasi yang dimaksudkan dapat mengatasi permasalahan tertentu diantaranya bukan hanya sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan yang bersifat berkepanjangan, yang harus dilakukan kelompok sasaran (unit) dalam organisasi sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu kebijakan juga merupakan penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungan organisasi.

Anderson (2014) kebijakan merupakan suatu bentuk tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau beberapa pelaku demi memecahkan suatu masalah. Anderson juga mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif maksudnya adalah apa yang harus dikerjakan pemerintah, sedangkan kebijakan procedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diselenggarakan. Yang berarti kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang di kembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Nugroho (2004) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang mengatur orang banyak yang harus di laksanakan dan berlaku mengikat seluruh warganya. Karena setiap pelanggaran akan di beri sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut bahkan

sanksi yang dijatuhkan harus dilakukan di depan masyarakat dan lembaga yang memiliki tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Syafie (2011) mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan (*policy*) harusnya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan adalah aturan yang telah di tetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi setempat oleh pejabat yang memiliki wewenang. Oleh karena itu Syafie menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu jawaban terhadap masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, memecahkan dan mencegah suatu keburukan serta menjadi penganjur, sebagai inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan tindakan yang terarah.

Menurut William Dunn (2003) mengemukakan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :

1. Saling ketergantungan, maksudnya adalah kebijakan bukan merupakan suatu permasalahan yang dapat berdiri sendiri melainkan bagian dari salah satu sistem masalah.
2. Subyektifitas, yaitu keadaan eksternal yang mengakibatkan suatu permasalahan yang harus diklarifikasikan, didefinisikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat bantuan, yaitu masalah-masalah kebijakan yang harus dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan, yaitu cara pandang orang terhadap masalah yang ada, pada akhirnya akan menetapkan solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah tersebut.

Empat hal diatas dapat menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih lagi jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya kebijakan dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan prinsip demokrasi.

Menurut Irfan Islami (2000) bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut : Dalam bentuk perdananya kebijakan publik berupa penetapan, kebijakan publik itu tidak cukup dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, sebelum melakukan sesuatu alangkah baiknya kebijakan publik harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan yang terakhir kebijakan publik harus senantiasa ditunjukkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Said Zainal (2012) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Kebijakan Umum merupakan kebijakan yang menjadi sebuah pedoman atau suatu petunjuk untuk melakukan pelaksanaan, baik yang bersifat positif ataupun negatif dan juga meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan Pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum tetapi untuk tingkat yang berbeda yaitu tingkat peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang dan peraturan pusat.
3. Kebijakan Teknis adalah kebijakan yang paling rendah tingkatannya karena berfungsi sebagai kebijakan operasional.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah spade hakekatnya kebijakan merupakan suatu tindakan-tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan serta dialokasikan kepada seluruh masyarakat, tindakan-tindakan ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada.

c. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to imprement* yang artinya adalah mengimplementasikan. Implementasi merupakan pengadaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang dapat menyebabkan efek dan akibat pada hal tersebut. Hal tersebut dikerjakan untuk menyebabkan efek dan akibat yang berbentuk ketentuan pemerintah, undang-undang, ketentuan peradilan dan juga kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi adalah suatu tindakan atau proses gagasan yang telah di susun dengan cermat dan detail, implementasi juga pada umumnya dianggap tuntas. Implementasi tidak hanya berupa aktivitas, namun sebuah kegiatan atau tujuan yang telah direncanakan serta dikerjakan dengan serius dan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud dan tujuan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya tetapi dipengaruhi juga dengan objek selanjutnya. Berikut adalah beberapa pendapat para pakar terhadap implementasi tersebut.

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi keempat ini mendapat perhatian lebih banyak ahli adalah "*integrated Implementastion Model*" yang dikembangkan oleh soren C Wrinter (2004) mereka

melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri mereka memperkenalkan pandangannya sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri. Mereka memperkenalkan pandangannya sebagai “model integrated” model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi yaitu dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Menurut Lane (2015) implementasi merupakan konsep yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai dengan definisi tersebut implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Implementor, Initiator, Time)*. Sesuai dengan definisi tersebut implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari kebijakan, pelaksanaan formasi, pelaksanaan implementasi, inisiator dan juga waktu.

Menurut Soren C. Winter mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selaian itu Winter juga mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor dan perilaku kelompok sasaran.

Menurut Mazmania dan Sebatier (2012) mengemukakan implementasi adalah memahami apa saja yang telah terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu focus perhatian implementasi itu

sendiri, yaitu dengan kejadian-kejadian dan berbagai kegiatan yang muncul sesudah ditetapkannya pedoman kebijakan yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan akibat atau dampak nyata dari masyarakat. Sedangkan menurut Grindle (2015) yaitu proses implementasi baru akan dimulai apabila suatu tujuan dan sasaran telah ditetapkan baik dalam program kegiatan yang telah tersusun dan dana yang telah dipersiapkan untuk disalurkan dalam mencapai sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn (2003) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

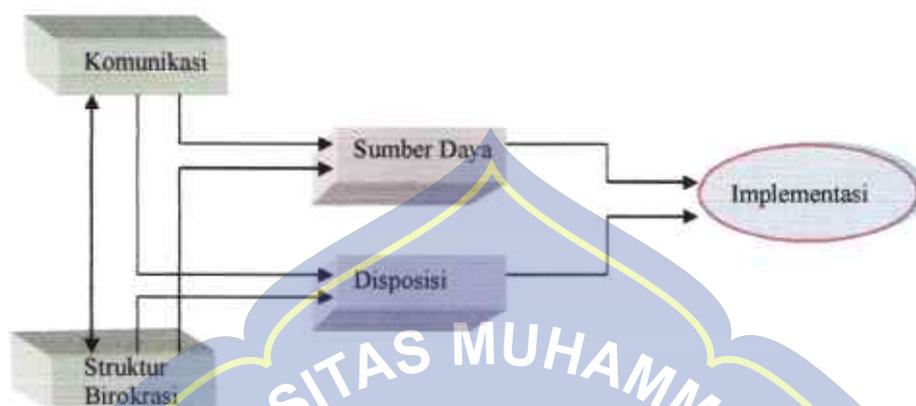
Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan (*output*) dan menghasilkan sebuah dampak (*outcome*) dari proses kebijakan tersebut.

Kebijakan yang telah direkomendasikan yang dipilih oleh *policy makers* bukanlah sebuah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada beberapa variable yang yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrasi pelaksana agar bersedia

memberikan sebuah pelayanan dan menbatur perilaku kelompok sasaran. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa kebijakan publik memiliki tiga tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Berikut merupakan teori implementasi kebijakan publik menurut beberapa pakar.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C.Edward III (1980) (dalam Parawangi,2011) disebutnya dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "*Policy Implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequence of the policy for the people whom it affects*" (Implementasi kebijakan adalah langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan konsekuensi dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi)". Menurutnya, masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention the decission of policy makers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi, sebagaimana tergambar berikut :

Model *Direct and Indirect Impacts on Implementation*: (Edward :1980).



1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus *tepat, akurat, dan konsisten*. Untuk mengetahui sejauhmana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsistensi, ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

(a) *Transmisi*: dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (*miskomunikasi*) disebabkan komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi. Akibatnya, terjadi distorsi membuat implementasi suatu kebijakan gagal.

(b) *Kejelasan* : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidaktepatan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan.

(c) *Konsistensi*, yakni perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya dapat berjalan dengan baik, yaitu :

a. *Staf*, atau lebih tepat dikenal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di

saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. *Fasilitas*, Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, bagi George C. Edvard III, adalah *disposisi*. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Di Indonesia sebagai misal, karena kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara stakeholder membuat implementasi kebijakan sering kali mengalami gangguan atau "kacau-balau". Meski demikian berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III di atas, maka kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, atau birokrasi pemerintahan.

Menurut Jones dalam Agustino (2016) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi atau pelaksanaan kebijakan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Organisasi, pembentukan atau penataan ulang sumber daya agar kebijakan dapat memberikan hasil yang mengarah pada upaya mewujudkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Interpretasi, merupakan kegiatan yang dilakukan substansi dalam suatu kebijakan agar bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga substansi kebijakan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. Penerapan, yaitu suatu ketentuan rutin dalam pelayanan dengan bentuk pembayaran atau lainnya sesuai dengan sasaran kebijakan yang ada.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2015) yang mempengaruhi kinerja implementasi terbagi menjadi lima variable yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan yaitu standar dan sasaran harus tepat, jelas dan terukur agar sasaran direalisasikan, karena apabila sasaran tidak sesuai maka akan mudah menimbulkan konflik antara sesama pelaku implementasi.
2. Sumber Daya yaitu dalam melaksanakan implementasi harus membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia (*human resource*) ataupun sumber daya non-manusia (*nonhuman resource*).
3. Hubungan antar Organisasi yaitu untuk melaksanakan berbagai program, implementasi justru memerlukan koordinasi dari instansi lain untuk keberhasilan suatu program yang direncanakan.
4. Karakteristik Agen Pelaksana yaitu ada beberapa yang mempengaruhi implementasi suatu program yakni norma-norma, birokrasi, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi yaitu yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan mencakup sumber daya ekonomi

lingkungan, keolompok kepentingan juga memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

6. Disposisi yaitu sikap menerima segala hal bentuk penolakan dari agen pelaksana yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik.

Dari beberapa definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu program yang melibatkan beberapa variabel untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Variabel itu termasuk sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel tersebut dapat mendukung berjalannya implementasi kebijakan publik.

d. Pengertian Sampah

Sampah memiliki pengertian yang beragam, setiap orang dapat memberikan pendapatnya mengenai sampah dengan berbagai rangkaian kata-kata *definitive* sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai sampah. Selain itu banyak aktivitas manusia yang tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus menerus akan menjadi tumpukan di alam. Yang termasuk dalam ciri-ciri sampah yaitu bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak dapat digunakan lagi ataupun bahan yang masih bisa diambil bagian utamanya. Bahan yang sudah ada nilai harganya merupakan aspek sosial ekonomis, sedangkan bahan yang tidak ada nilai gunanya dan menimbulkan masalah pencemaran bahkan gangguan pada kelestarian lingkungan termasuk dalam aspek lingkungan.

Menurut Bahar (1990) sampah merupakan barang yang tidak dapat digunakan lagi berupa bahan padat yang berdampak pada turunnya nilai estetika

pada lingkungan, nilai sumber daya. Bahkan menimbulkan penyakit, polusi, menyumbat saluran air dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Sedangkan menurut Hadiwiyoto (1983) sampah merupakan sisa-sisa bahan yang tidak digunakan lagi tetapi mengalami perlakuan karena diambil bagian utamanya, dikelola ataupun sudah tidak ada manfaatnya. Dari segi ekonomis sudah tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan sampah adalah bahan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses lain yang berbentuk padat, sedangkan sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Berdasarkan pengertian mengenai sampah diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan. Baik bahan yang tidak dapat digunakan atau masih dapat dikelola bagian utamanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan manusia yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang diatas terdiri dari :

1. Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan yang menguntungkan seperti industry, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya.
3. Sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang menimbulkan bencana seperti puing bongkaran bangunan dan sampah yang secara ekonomi tidak dapat diolah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah yang bernilai ekonomis. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu:

1. Memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah tersebut.
2. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
3. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara ketempat pengelolaan sampah menuju tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah yaitu pengembalian sampah yang sudah dikelola ke media lingkungan secara aman. Sementara sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam pengelolaan sampah bukan hanya pemerintah yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian, karena masyarakat merupakan faktor utama dalam

suksesnya pengelolaan sampah. Untuk itu dalam program kebijakan pemerintah setiap rumah tangga disarankan dapat mengelola sendiri sampah melalui program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) yaitu :

1. *Reduce* (mengurangi) adalah meminimalisasi atau mengurangi bahan atau material yang kita gunakan, karena semakin banyak material yang kita gunakan maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.
2. *Reuse* (memakai kembali) adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali. Karena hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah.
3. *Recycle* (mendaur ulang) adalah sampah yang bisa diolah kembali, memang tidak semua sampah yang bisa dikelola kembali tetapi sudah banyak sektor rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali.

Penanganan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Termasuk dampak bagi kesehatan, ekonomi sosial dan budaya. Bahkan dampak yang paling besar adalah dapat merusak lapisan ozone yang berada di atmosfer bumi akibat pengelolaan sampah yang tidak baik. Berikut adalah dampak yang dihadapi dalam penanganan sampah yang tidak baik dan bijak, yaitu :

1. Berdampak untuk kesehatan, sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan mengganggu kesehatan bagi kita yang akan menimbulkan berbagai penyakit.
2. Berdampak pada udara, seperti asap yang berasal dari industry pabrik dan kendaraan yang dapat mencemari lingkungan di udara. Mengakibatkan udara

menjadi kodor dan membahayakan bagi manusia yang menghirup udara tersebut, tidak hanya itu asap juga dapat melubangi ozon (pelindung bumi).

3. Berdampak pada lingkungan (Nilai estetika) sampah yang dibiarkan menumpuk dilingkungan terbuka menyebabkan rendahkan nilai estetika disekitara tempat tersebut. Dilihat dari penampilan fisik yang tidak layak dilihat, bau busuk yang tidak sedap dan berkembangnya berbagai organisme.

e. Konsep Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 Bank sampah adalah tempat pemilihan sampah atau pengumpulan sampah yang masih bisa di daur ulang atau dapat digunakan kembali yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah juga merupakan konsep pengumpulan sampah kering yang telah dipilih dan juga memiliki manajemen layaknya perbankan akan tetapi bukan uang yang ditabung melainkan sampah. Pengelolaan sampah ditingkat masyarakat yaitu bank sampah yang merupakan salah satu strategi penerapan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R).

Dikutip dari Wikipedia.org "Bank sampah muncul karena adanya keprihatinan dari masyarakat akan lingkungan sekitar yang semakin lama semakin dipenuhi dengan berbagai jenis sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah yang terus bertambah pasti akan menimbulkan masalah, untuk itu diperlukan pengelolaan seperti membuat sampah menjadi bahan-bahan yang berguna. Pengelolaan sampah menggunakan sistem bank sampah ini juga membantu pemerintah dalam menangani sampah dan

meningkatkan ekonomi masyarakat. Fungsi dari bank sampah terbagi menjadi tiga aspek, yaitu :

1. Fungsi Sosial

Dalam fungsi social ini hadirnya bank sampah diharapkan dapat menjadi ruang untuk berinteraksi bagi seluruh warga kota Makassar tepatnya di lingkungan tempat bank sampah berada. Agar masyarakat memiliki rasa saling menjaga dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

2. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi yang diberikan oleh bank sampah adalah dengan memberikan nilai lebih kepada sampah, bukan lagi hanya sebagai beban untuk manusia tetapi sebagai anugerah karena memiliki nilai jual. Selain itu bank sampah juga hadir sebagai lapangan kerja baru dengan bergabung dengan bank sampah ataupun menjadi nasabah yang memiliki penghasilan yang tidak sedikit.

3. Fungsi Lingkungan

Agenda besar dalam hadirnya bank sampah adalah untuk mereduksi sampah yang masuk ke TPA. Dapat dilihat kondisi TPA kota Makassar di Kelurahan Tamalanrea yang semakin sesak dengan sampah dan juga banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD pengelolaan daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di bentuk UPTD pengelolaan daur ulang sampah sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Makassar dalam mengurus

bank sampah yang ada. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 berikut adalah standar manajemen dalam bank sampah, yaitu :

1. Penabung Sampah. Dilakukannya penyuluhan paling sedikit satu kali dalam tiga minggu, diberikan tiga wadah atau tempat sampah, mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah, melakukan pemilahan sampah dan melakukan upaya mengurangi sampah.
2. Pelaksana Bank Sampah. Selama melayani wajib menggunakan alat pelindung, membersihkan tangan, direktur Bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, mengikuti pelatihan Bank sampah, melakukan monitoring.
3. Pengepul/Pembeli Sampah/Industri Daur Ulang. Tidak melakukan pembakaran sampah, mempunyai naskah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah, mampu menjaga kebersihan lingkungan.
4. Pengelolaan sampah di Bank Sampah. Sampah yang layak ditabung wajib diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali, sampah yang masih layak kreasi di daur ulang kembali oleh pengrajin binaan bank sampah.
5. Peran Pelaksanaan Bank Sampah. Sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan, penyediaan data, menjadi fasilitator untuk kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan bank sampah.

Manfaat bank sampah yaitu memangkas jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, membangun lingkungan

yang bersih dan sehat dan juga membangun kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menghargai lingkungan hidup.

C. Kerangka Pikir

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh karena itu diperlukan pemberdayaan dengan cara memilah sampah. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah dengan program 3R melalui bank sampah dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui bank sampah.

Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah berbasis rumah tangga yang dapat diolah atau daur ulang dan dapat digunakan yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah memiliki konsep dasar yaitu 5M : Mengurangi sampah, memanfaatkan sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah dan menabung sampah. Kehadiran bank sampah di Kota Makassar membawa perubahan mulai dari lingkungan, social, hingga ekonomi. Apalagi saat ini pengelolaan bank sampah di Kota Makassar telah menjadi percontohan Nasional.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling penting secara keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar menjadi impian juga tidak tertuang dalam kertas kalau tidak diimplementasikan. Begitu juga dengan pelaksanaan bank sampah, kebijakan harus diimplementasikan karena proses kebijakan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan.

Gambar. Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus implementasi program 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) yang akan menjadi indicator untuk mengetahui bagaimana proses implementasi yang dilakukan oleh bank sampah dalam program 3R tersebut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Menurut George Edward III implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak, selain itu Edward juga mengemukakan empat variabel dalam implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut harus dilaksanakan secara beraturan karena antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program *Reuse, Reduce dan Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan

Program 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) merupakan prinsip modern dari pengelolaan sampah yang kemudian menjadi slogan bank sampah di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah menyatakan kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) dapat maksimal diterapkan melalui bank sampah, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan suatu implementasi kebijakan. Dalam program *Reuse, Reduce dan Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah untuk mencapai hasil yang telah ditentukan dan untuk mendapatkan komunikasi yang berlangsung dengan baik maka terjadilah beberapa kegiatan, sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Pertemuan dilakukan melalui tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan sehingga memungkinkan mengumpulkan warga dengan cakupan yang luas. Informasi yang disampaikan antara lain tentang bank sampah, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih memahami mengenai pengelolaan sampah program *reuse, reduce dan recycle* (3R).

2. Pendampingan

Setelah adanya kesepakatan yang terjadi antara masyarakat untuk menjalankan pengelolaan sampah dengan program *reuse, reduce dan recycle* (3R) maka dilakukan pendampingan guna mencapai hasil yang telah ditentukan. Pendampingan ini sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut karena proses pendampingan dilakukan oleh

seseorang yang lebih berpengaruh mengenai pengelolaan sampah program *reuse, reduce dan recycle* (3R).

b. Sumberdaya

Guna mencapai hasil yang telah ditentukan, sumberdaya termasuk salah satu peran penting untuk mendapatkan hasil yang baik dalam program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah.

Sumberdaya yang ada meliputi :

1. Sumberdaya Manusia

Dimana untuk melaksanakan program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah, SDM sangat berpengaruh sebagai salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah kebijakan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan kebijakan. Pengembangan sumber daya manusia juga perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung sdm tersebut.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor. Dimana pegawai yang berperan dalam menjalankan program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah memang sudah mengetahui tugas masing-masing dengan baik. maka pegawai tidak hanya mengetahui tugas mereka tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga prakteknya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

d. Struktur birokrasi

Untuk mencapai keberhasilan program 3r dalam pengelolaan sampah mesti adanya kerjasama antara instansi-instansi yang ada baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Karena ketika struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik maka kebijakan yang sudah ditentukan juga tidak akan terlaksana seperti tujuan awalnya.

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pendamping dalam berlangsungnya program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya itu DLH juga tiap tahunnya merayakan Hari peduli sampah nasional (HPSN) yang dibarengi dengan kegiatan gotong royong tiap-tiap kelurahan, pengurangan sampah plastic dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah.
2. UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar berperan sebagai instansi yang berperan dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah unit dalam pengelolaan sampah demi mewujudkan tercapainya program *reuse, reduce dan recycle* dalam pengelolaan sampah.
3. Bank sampah unit merupakan faktor yang paling mendukung terlaksananya program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah dimana bank sampah unit ini lebih dekat dari lingkungan untuk mengontrol masyarakat memilah sampah langsung dari sumbernya. Dan juga bank sampah unit membantu masyarakat

biasa untuk mendapatkan penghasilan lebih dalam menjalankan program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah.

4. Kecamatan Ballaparang berperan untuk melangsungkan sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat sekitar demi terlaksanakan program *reuse, reduce dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah dibank sampah pelita harapan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Implementasi Program *Reuse, Reduce, Recycle (3R)*” dalam Pengelolaan di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah dilakukannya seminar proposal dan lokasi penelitian didalam lingkup wilayah Kota Makassar, alasan peneliti memilih lingkup Kota Makassar karena pengelolaan sampah menggunakan program (3R) melalui bank sampah belum berjalan secara optimal. Sesuai dengan judul tersebut penelitian dilakukan pada unit lokasi penelitian antara lain di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang, UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar dan masyarakat sekitar BSU.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah dengan menggunakan program (3R) yang di lakukan oleh Bank Sampah Pelita Harapan dalam mengurangi pembungan sampah di TPA Tamalanrea. Maka penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan data empirik dibalik kejadian secara mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan detail objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode kualitaif juga disebut metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai interpretive. (Sugiyono, 2014).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Dan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian yang tentunya berada pada wilayah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan penelitian sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang akan digunakan untuk penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan pada Bank sampah pelita harapan, UPTD pengelolaan daur ulang sampah serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

2. Data Skunder

Merupakan bahan pelengkap yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisi data primer. Selain itu data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-surat, intruksi presiden, peraturan daerah, Koran, artikel dan data-data lainnya yang berkaitan dengan implementasi program 3R dalam pengelolaan sampah di bank sampah pelita harapan.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah aparatur dan tokoh masyarakat yang menangani langsung atau yang terkait dalam penelitian ini.

Informan penelitian ini terdiri dari :

Tabel Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Nasrun, SE	NA	Kepala UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar	1
2	Suardi Nurdin, S.Sos	SN	Kasubag Tata Usaha UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar	1
3	Surasmi	SI	Direktur Bank Sampah Pelita Harapan	1
4	Ir. Ridwan, MM	RW	Kepala Kelurahan Ballaparang	1
5	Eva Yuliatna	EY	Masyarakat	1
Jumlah				5

E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam tahap penelitian, selain itu pengumpulan data juga jauh lebih penting untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam menyusun proposal ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara.

1. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pemantauan secara langsung di lapangan terhadap gejala-gejala subjek yang ingin diteliti. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara.
2. Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, samnil bertatap muka antar peneliti dan informan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan panduan wawancara dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan. Selain itu instrument yang digunakan untuk melakukan wawancara meliputi *taperecorder* dan catatan-catatan kecil.
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memiliki kegunaan untuk mempermudah peneliti dalam memahami suatu gambaran secara menyeluruh atau bagian yang sudah ditentukan dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa saja yang terjadi dan mempersiapkan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa saja yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyampaian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya untuk menjelaskan implementasi program 3R tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara sistematis selama penelitian berlangsung. Dalam proses penelitian penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dan rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan skunder.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Dalam teknik pengabsahan data ada salah satu cara yaitu dengan menggunakan proses triangulasi, yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data tanpa memanfaatkan sesuatu diluar data dan untuk keperluan pengecekan sebagai suatu perbandingan dengan data tersebut. Pada hakikatnya triangulasi adalah pendekatan sistem yang dilakukan pada saat mengumpulkan suatu data dan menganalisis data. Triangulasi juga memiliki Ide dasar yaitu kejadian yang diteliti dapat juga dipahami dan

dimengerti dengan baik dan jelas sehingga memperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasi berikut yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya mencocokkan hasil pengamatan dengan wawancara, juga membandingkan apa yang ingin dikatakan pribadi dan membedakan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk membuktikan kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan

dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a. Batas Utara: Kabupaten Maros
- b. Batas Timur: Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- 2) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

2. Profil Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar

a. Sejarah Bank Sampah Pelita Harapan

Bank sampah Pelita Harapan yang terletak di RW 04 Kelurahan Ballaparang memulai kegiatan bank sampah pada bulan Oktober 2011. Kegiatan pengelolaan bank sampah yang diawali oleh program MGC dan Kampung Pintar. Kegiatan bank sampah Pelita Harapan terus berlanjut sampai saat ini. Hal ini tampak pada pengorganisasian dan pelaksanaan bank

sampah. Bank sampah Ballaparang merupakan gagasan dari YPN (Yayasan Peduli Negeri) yang awalnya pada tahun 2009 bernama MGC (Makassar Green & Clean) barulah kemudian pada tahun 2011 berganti nama menjadi bank sampah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga sumbangsi ide dan pemikiran dari seorang motivator yang berasal dari Kota Surabaya yang merasa prihatin akan kondisi sampah yang makin hari makin menumpuk, sedangkan kepedulian warga sangat tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Dari hal tersebut maka timbulah ide bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sampah dengan besar sekaligus memberi manfaat pula bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sehingga terbentuklah bank sampah pelita harapan.

b. Visi dan Misi Bank Sampah Ballaparang

1) Visi

“Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat berlandaskan keimanan dan ketaqwaan di Kelurahan Ballaparang”

2) Misi

- a) Meningkatkan semangat masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat
- b) Meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara aktif dan kreatif
- c) Merubah pola pikir masyarakat bahwa sampah memiliki nilai kegunaan bila dikelola dengan baik dan benar
- d) Meningkatkan kehidupan yang disiplin, tolong menolong dan peka

terhadap lingkungan

- e) Menambah pendapatan masyarakat untuk memajukan kehidupan ekonomi yang berkah

Bank sampah pelita harapan memiliki target untuk mewujudkan visi dan misi di atas dengan beberapa program kerja diantaranya yaitu :

1. Jangka pendek
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan melalui kegiatan sosialisasi *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan pelatihan membuat kerajinan dari limbah sampah organik. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai modal awal untuk meningkatkan kesejahteraan.
 - b. Melaksanakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan study banding tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan untuk menambah wawasan
 - c. Menjadikan seluruh warga RW menjadi nasabah bank sampah
2. Jangka Menengah
 - a. Peningkatan SDM melalui program komputerisasi untuk meningkatkan efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran bank sampah (kantor, gudang, dll)
3. Jangka Panjang
 - a. Mewujudkan kampung organik

- b. Semua warga berbudi daya tanaman organik dengan menggunakan pupuk organik hasil dari pengolahan sampah rumah tangga ataupun sampah pekarangan.

3. Profil UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar

a. Sejarah UPT Bank Sampah Pusat

Kegiatan Bank Sampah merupakan salah satu solusi untuk persoalan persampahan di kota besar. Begitu besarnya potensi sampah yang bisa dikelola khususnya Kota Makassar merupakan salah satu jalan keluar paling jitu untuk menghemat anggaran dan akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Selain itu peningkatan bidang ekonomi dari transaksi yang terjadi di produk sampah dapat dengan mudah meningkat, yang juga berbanding lurus dengan usia penggunaan lahan TPA yang semakin lama.

Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan langkah utama untuk memberikan paradigma serta pengajaran oleh seluruh warga kota dalam membudayakan permukiman yang bersih, hijau dan sehat. Dari paparan diatas terbukti sangat jelas terlihat bahwasanya sampah perkotaan setiap saat dihasilkan, sampah permukiman setiap saat mengancam budaya bersih indah dan sehat kota. Dari kondisi tersebut tentu dibutuhkan banyak waktu, banyak tenaga dan banyak anggaran jika tidak sedini mungkin ditangani secara massif terorganisir dan terpadu. Disisi lain dalam pengelolaan sampah yang tepat jitu tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan oleh semua pihak, ini dikarenakan manfaat berkah sampah dapat diraup sebesar-besarnya dari hasil buangan. Kesimpulannya adalah ketika sampah dikelola dengan baik maka terjadi rotasi terbaik dalam siklus perubahan aktivitas sehari-hari,

bagaimana hubungan mutualisme yang terjalin dengan sempurna untuk mendukung kenyamanan manusia.

Adapun Dasar dibentuknya UPT Bank Sampah Ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 4) Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) melalui Bank Sampah.
- 7) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- 8) Perwali Kota Makassar No. 126 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Tata kerja UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Surat edaran walikota Makassar Nomor : 660.1/137/S.Edar/BLHD/IX tentang

pengurangan sampah.

b. Kriteria Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

a) Kegiatannya merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dasar dari kegiatan ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten/Kota. Dan juga yang mendasari adanya UPT ini adalah Permen LH Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) melalui Bank Sampah.

b) Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan

UPT ini adalah pelaksana dari Dinas Lingkungan Hidup yang bersifat teknis.

c) Bukan merupakan kegiatan lintas SKPD

Urusan persampahan hanya ditangani oleh satu dinas yaitu DLH

d) Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan yang dilakukan oleh UPT ini bersifat terus menerus atau berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan fungsi-fungsi manajerial agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajerial tersebut adalah mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan.

2) Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau Perangkat Daerah lain.

a) Barang atau jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang kolektif maupun barang individu.

Barang/jasa yang dihasilkan oleh UPT ini adalah berupa jasa pelayanan penjemputan dan pembelian produk sampah. Serta pendampingan ke masyarakat terkait operasional dan manajemen program bank sampah.

b) Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus.

Kegiatan pelayanan persampahan ini harus dilakukan secara terus menerus setiap hari, karena apabila kegiatan pelayanan dan pengangkutan sampah ini berhenti maka akan terjadi penumpukan sampah di setiap bank-bank sampah yang ada. Dan ini akan mengakibatkan pemandangan yang tidak enak untuk dilihat dan terkesan jorok/berantakan nantinya.

3) Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a) Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat.

Dengan adanya UPT ini, rentang kendali dan jarak pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat sehingga waktu dan biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan ini menjadi semakin hemat.

- b) Layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah.

Pelayanan penjemputan dan pembelian produk sampah ini adalah pelayanan yang bersifat pokok dan harus ada bagi masyarakat. Apabila pelayanan ini terhenti atau ditiadakan, maka akan timbul permasalahan sosial. Daerah akan menjadi lautan sampah, bau tidak sedap bertiup kemana-mana.

- c) Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA, atau Penyedia lainnya.

★ Sampai saat ini belum ada lembaga lain yang sanggup menggantikan fungsi UPT Bank Sampah. Karena untuk melakukan kegiatan ini diperlukan biaya operasional, peralatan dan armada yang tidak sedikit sehingga bisa dikatakan biaya operasional, armada dan perlengkapan ini harus dimaksimalkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dilapangan.

- 4) Memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bank Sampah jelas harus mengacu dari SOP yang telah dibuat dan ditetapkan, dan SOP ini akan menjadi acuan kerja bagi semua orang yang bekerja dalam lingkup UPT Bank Sampah. Sehingga dengan adanya SOP ini juga akan membuat orang lebih disiplin dalam bekerja dan juga untuk melatih para pekerja

untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama.
(Flow Chart SOP Terlampir).

- 5) Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan. Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT tersebut sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Tenaga teknis yang diperlukan adalah :

- a) Kepala UPT 1 orang
- b) Kasubag TU 1 orang
- c) Tenaga Administrasi 23
- d) Tenaga Pengangkut 7 Orang
- e) Tenaga Pemilah 34 Orang
- f) Tenaga Supir 12 Orang
- g) Pendamping Driver/Dropping 7 Orang

c. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar

- 1) Uraian tugas Unit Perencanaan :
 - a) Melaksanakan kemitraan dengan lembaga/instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPT Bank Sampah
 - b) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada Bank Sampah Unit
 - c) Melaksanakan Pelatihan pengembangan Usaha berbasis sampah terhadap Bank Sampah
 - d) Mengumpulkan informasi tentang pengembangan teknologi pengolahan sampah
 - e) Melakukan Pengumpulan data terkait dengan bidang tugas UPT Bank

Sampah.

- f) Memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran yang berhubungan dengan tugas UPT Bank Sampah.
 - g) Membuat Laporan Bulanan Produksi dan Penjualan.
 - h) Membuat Laporan Bulanan Perkembangan Bank Sampah .
 - i) Menyusun Laporan Tahunan UPT Bank Sampah.
 - j) Membuat Laporan hasil pelaksanaan Tugas kepada kepala UPT Bank Sampah yang diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.
- 2) Unit Pemasaran dan Pembiayaan :
- a) Mengkoordinir pembelian hasil olahan sampah organik (kompos) dan anorganik pada Bank Sampah.
 - b) Mengkoordinir penjualan hasil pengolahan daur ulang sampah.
 - c) Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pemulung usaha dibidang pengelolaan daur ulang sampah.
 - d) Memfasilitasi pembiayaan usaha Bank Sampah dalam usaha diversifikasi usaha Bank Sampah.
 - e) Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pembelian Barang dari BSU dan Bendahara Pemasukan dari hasil Penjualan ke Vendor atau Pabrik.
 - f) Membuat Laporan harga pasar lokal hasil olahan sampah, Reduksi Sampah dan Residu.
 - g) Membuat Laporan Pembelian dan Penjualan hasil olahan daur ulang sampah.

h) Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.

3) Unit Operasional :

- a) Mengkoordinir pengumpulan dan pengangkutan hasil olahan sampah pada Bank Sampah
- b) Mengkoordinir pengolahan sampah pada TPS 3R unit.
- c) Melaksanakan pemeliharaan terhadap operasional kendaraan dan mesin pengolah
- d) Membuat laporan Rekapitulasi angkutan hasil pengolahan sampah dari Bank Sampah.
- e) Membuat Laporan Rekapitulasi Produksi hasil olahan daur ulang sampah
- f) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh Kasubag Tata Usaha.

4) Unit Administrasi :

a) Adm. Keuangan :

- 1) Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran belanja UPT, Sesuai DPA pada UPT Bank Sampah.
- 2) Melaksanakan administrasi pembukuan dalam hal pembelian dan penjualan hasil olahan daur ulang Sampah.
- 3) Membuat Laporan Bulanan yang berkaitan dengan tugas administrasi keuangan kepada kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh

Kasubag. Tata Usaha.

b) Adm. Kepegawaian dan Rumah Tangga:

- 1) Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian pada UPT Bank Sampah Menyusun kebutuhan tenaga pada TPS 3R
- 2) Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UPT Bank Sampah.
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data dan Pengimputan Data (Registrasi) Nasabah Bank Sampah Unit (BSU), BSU Sekolah dan Bank Sampah Sektoral (BSS) melalui Aplikasi Bank Sampah secara online.
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Data pada Server agar dapat meminimalisis terjadinya gangguan pada Hardwere dan Softwere.
- 5) Melaksanakan pengagendaan dan pengarsipan surat.
- 6) Melaksanakan Kegiatan KeHUMASan.
- 7) Melaksanakan pengelolaan keamanan ,kebersihan dan pramukantor.
- 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.

c) Adm. Pengelolaan Barang.

- 1) Melaksanakan pencatatan barang aset (Inventarisir) UPT Bank Sampah.
- 2) Membuat usulan Melaksanakan Inventarisir Barang Meubiler, Kendaraan Bermotor dan Alat-alat lainnya dan kebutuhan barang pada TPS 3R dan TPS 3R unit dan Bank Sampah

- 3) Membuat daftar dan menyimpan bukti hasil penggantian suku Cadang operasional kendaraan dan mesin.
 - 4) Melaksanakan control terhadap persediaan, pembelian dan pendistribusian beras sebagai alat pembayaran sampah.
 - 5) Membuat laporan bulanan pengelolaan barang UPTD. Pengelolaan Sampah yang Diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.
- d) Penanggung Jawab Organik dan TPS 3R :
- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan hasil daur ulang sampah dari Bank Sampah yang berada di wilayahnya.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pengolahan sampah pada TPS 3R nya.
 - 3) koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan operasional di TPS 3R Unit.
 - 4) Membuat laporan harian angkutan hasil daur ulang sampah TPS 3R dari Bank Sampah kepada Unit Operasional
 - 5) Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.
- e) Penanggung Jawab (An Organik) Bank Sampah dan Daur Ulang:
- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan hasil Daur Ulang Sampah dari Bank Sampah Unit yang berada beberapa wilayah.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pengolahan sampah Daur Ulang atau Pemilahan pada BSU, Sekolah dan Sektoralnya.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran

pelaksanaan operasional di Bank Sampah Unit (BSU), BSU Sekolah dan BSU Sektoral.

- 4) Membuat laporan harian ngkutan hasil daur ulang sampah TPS dari Bank Sampah kepada Unit Operasional
- 5) Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Bank Sampah yang Diketahui oleh Kasubag. Tata Usaha.

B. Implementasi Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan

Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) merupakan prinsip modern dari pengolahan sampah yang kemudian menjadi slogan bank sampah di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reuse, Reduce, dan Recycle* melalui bank sampah menyatakan bahwa kegiatan *Reuse, Reduce, dan Recycle* atau guna ulang sampah, batasi sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih dapat di pakai dengan fungsi yang sama atau juga fungsi lain, mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dapat maksimal diterapkan melalui bank sampah, bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi. Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

tentang pedoman pelaksanaan *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* melalui bank sampah dalam Pasal 2 Ayat (2) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Menurut Notoatmojo (2003) jenis sampah rumah tangga terbagi menjadi dua jenis sampah yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya; logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan buah-buahan.

Menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2016:136-141) memandang implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* menanamkan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III untuk menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan publik khususnya *Reuse*, *Reduce*, *Recycle* (3R) membutuhkan komunikasi yang baik. Untuk menghasilkan suatu implementasi yang efektif terlebih dahulu para pembuat keputusan harus mengetahui masing-masing tugas yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variable

komunikasi, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai

Kepala UPT Mengatakan:

“memang kita pernah melakukan sosialisasi mengenai program 3R dalam pengelolaan sampah hanya saja tidak rutin karena kami memberikan wewenang kepada pihak kelurahan Ballaparang untuk melaksanakan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat sekitar tentang program 3R dan pentingnya menjaga kebersihan” (Wawancara NA Kamis 11 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator komunikasi dapat dipahami bahwa Pihak UPT melakukan sosialisasi tidak secara rutin dan memberikan tanggungjawab kepada pihak kelurahan dengan Bank sampah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam mengelola sampah utamanya sampah plastik yang telah dipilih dari sumbernya langsung yaitu setiap rumah warga (*Reuse*).

Selanjutnya, wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Bank Sampah Pusat mengatakan:

“Untuk meningkatkan kualitas kejelasan dalam komunikasi kami dengan aparaturnya Kelurahan Ballaparang dan Bank Sampah pelita Harapan kami berharap kelurahan meningkatkan lagi sosialisainya dan juga pendampingan terhadap masyarakat sekitar. Agar bisa lebih memahami mengenai program 3R dalam pengelolaan sampah. Dan juga meminta bantuan kepada lembaga-lembaga nonformal, terutama di tingkat RW maupun RT. Pertemuan warga tingkat RT, kelompok PKK, kelompok dasa wisma, posyandu, kelompok pengajian, serta keagamaan lain, serta kelompok remaja dari berbagai sektor untuk dijadikan media komunikasi” (Hasil wawancara SN Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator komunikasi dapat dipahami bahwa komunikasi dalam kegiatan *Reduce* belum

cukup baik karena menurut informan sosialisasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan cara menekan aparat kelurahan agar turun ke bawah, sembari menghidupkan kembali komunikasi informal dengan kelompok informal, baik melalui lobi-lobi pribadi, serta berbagai forum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.

Selanjutnya, wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pelita Harapan mengatakan:

“Dalam komunikasi kegiatan *Recycle* kita harus konsisten kepada warga atau binaan dalam sosialisasi yang dilakukan, tidak serta merta untuk menggugurkan kewajiban akan tetapi bermanfaat dan berguna kepada masyarakat untuk di realisasikan” (Hasil wawancara SI Jumat 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator komunikasi dapat dipahami bahwa Sosialisasi kegiatan *Recycle* harus konsisten untuk dijalankan berdasarkan tujuan yang tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban tapi kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan berguna kepada masyarakat untuk di realisasikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan Kepala Kelurahan Ballaparang, yang mengatakan :

“kita disini memang sudah diberikan tanggungjawab kepada pihak UPT untuk melakukan sosialisasi dan juga pendampingan agar tercapainya program 3R dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi masih banyak kendala yang kami dapatkan salah satunya lokasi untuk sosialisasi dan juga tenaga ahli pendamping yang tahu jelas mengenai program 3R ini” (Hasil wawancara RW Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan dengan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa memang benar pihak kelurahan ballaparang sudah memiliki tanggungjawab yang penuh dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan.

Akan tetapi kendala yang muncul masih saja ada seperti kurangnya lokasi sosialisasi dan tidak adanya tenaga pendamping yang lebih berkompeten dibidangnya.

Selanjutnya hasil wawancara dari informan berikutnya salah satu warga kelurahan ballaparang, mengatakan :

“kami memang disini mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap program 3R dalam pengelolaan sampah tetapi proses tersebut tidak dilakukan secara berlaka. Sehingga membuat masyarakat yang ingin berpartisipasi malah jadi enggan karena kurangnya informasi mengenai program tersebut”. (Hasil wawancara EY Jumat 12 Februari 2021).

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan diatas terkait indikator komunikasi bahwa Pihak UPT pernah melakukan sosialisasi tetapi setelah itu pihak UPT memberikan wewenang kepada pihak Kelurahan Ballaparang untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang program 3R dalam pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam mengelola sampah utamanya sampah plastik yang telah dipilih dari setiap rumah warga atau dari sumbernya (*Reuse*), dalam program (*Reduce*) belum cukup baik karena masih perlu ditingkatkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat dapat lebih mengerti dan tahu tentang pengelolaan sampah. Justru seharusnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan harus secara berkala atau rutin dilakukan agar berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk merealisasikannya (*Recycle*). Bukan hanya itu proses sosialisasi dan pendampingan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, dan juga tenaga pendamping yang ahli mengenai program 3R dalam pengelolaan sampah.

2. Sumberdaya

Sumber Daya merupakan salah satu hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanpa sumberdaya kebijakan yang ditetapkan tidak bisa terlaksana sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Mengatakan:

“Dalam meningkatkan program 3R dalam pengelolaan sampah kami berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai agar tugas yang telah ditetapkan dan diberikan dapat berjalan dengan baik dan terarah sesuai kemampuannya masing-masing” (Wawancara NA Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Sumberdaya dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan kegiatan 3R pihak UPT berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Selanjutnya, wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Bank Sampah Pusat mengatakan:

“Sosialisasi dalam peningkatan 3R yang pihak kami lakukan demi mensukseskan kegiatan ini memang sudah dialihkan ke kelurahan ballaparang, dengan melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan sampah program 3R kepada masyarakat berbasis kelompok agar supaya lebih mengena sasaran dan mudah untuk diimplementasikan. Tetapi kurangnya sarana dan prasarana mengakibatkan belum maksimal program *Reuse dan Reduce*. (Hasil wawancara SN Kamis, 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Sumberdaya dapat dipahami bahwa peningkatan 3R dilaksanakan dengan sosialisasi untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran, tapi kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan *Reuse dan Reduce* menghambat

terlaksananya program ini dengan maksimal.

Selanjutnya, wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pelita Harapan mengatakan:

“Kegiatan 3R yang berjalan saat ini direalisasikan oleh masyarakat berdasarkan hasil sosialisasi Kelurahan Ballaparang yaitu *Recycle* karena banyak masyarakat yang lebih minat dan menyukai kegiatan tersebut yaitu dengan mengumpulkan sampah bekas yang dapat didaur ulang dan mudah terurai seperti pengelolaan non organik menjadi barang yang bermanfaat” (Hasil wawancara SI Jumat, 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Sumberdaya dapat dipahami bahwa Kegiatan 3R yang paling diminati dan dapat dikatakan berhasil direalisasikan masyarakat karena sosialisasi pihak Kelurahan Ballaparang yaitu kegiatan *Recycle*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan Kepala Kelurahan Ballaparang, yang mengatakan :

“untuk melaksanakan suatu kebijakan perlu adanya sumberdaya yang tersedia, yang sangat berperan penting dalam tercapainya tujuan yaitu adanya sumberdaya manusia yang ikut mensukseskan program 3R dalam pengelolaan sampah. Sumberdaya manusia juga tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak adanya sarana dan prasana yang menjadi pendukung terlaksananya kebijakan tersebut” (Hasil wawancara RW Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sumberdaya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Bukan hanya itu, sumberdaya manusia juga tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kebijakan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan salah satu warga Kelurahan Ballaparang, Mengatakan:

“dalam melaksanakan suatu kebijakan pasti terdapat keterlibatan dari pihak luar seperti tadi, bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial dengan sifat yang konsumertatif dan rasa tidak pernah puas maka akan menjadi kendala terhadap pelaksanaan kebijakan program 3R dalam pengelolaan sampah maupun kebersihan” (Hasil wawancara EY Jumat 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksana program mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program. Walaupun terkadang dilapangan masyarakat tidak sedikit yang masih kurang sadar akan kebersihan, pelaksana program tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat sehingga nantinya bisa sadar akan pentingnya keberhasilan program 3R ini. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar dari pelaksana program untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan diatas terkait indikator Sumberdaya bahwa dalam meningkatkan kegiatan 3R pihak UPT berupaya sosialisasi dengan tujuan dapat meningkatkan kegiatan tersebut tetapi sudah dialihkan kepada Kelurahan Ballaparang untuk melaksanakan sosialisasi. Peningkatan 3R dilaksanakan dengan sosialisasi tapi kurangnya sarana dan prasarana yang menghambat dalam kegiatan *Reuce* dan *Reduce*. Kegiatan 3R yang paling diminati dan dapat dikatakan Berhasil direalisasikan masyarakat karena sosialisasi UPT yaitu kegiatan *Recycle*. Sumberdaya manusia juga sangat berpengaruh dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksana program mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program. Walaupun terkadang dilapangan masyarakat tidak sedikit yang masih kurang sadar akan kebersihan, pelaksana program tidak henti-hentinya mengingatkan

masyarakat sehingga nantinya bisa sadar akan pentingnya keberhasilan program 3R ini. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar dari pelaksana program untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal.

3. Disposisi

Faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi salah satunya adalah disposisi atau sikap implementor. Jika pandangan implementor berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Mengatakan:

“Dalam kegiatan 3R kami beri tugas kepada para SDM kami, setiap ada kendala dilapangan selalu kami beri pengawasan akan kendala yang di hadapi sehingga masalah bisa terbendung” (Wawancara NA Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Disposisi dapat dipahami bahwa Pihak UPT disposisikan kegiatan 3R kepada staff yang bersangkutan dengan tidak terlepas dari aturan dan adanya kendala yang bisa terbendung dan terselesaikan.

Selanjutnya, wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Bank Sampah Pusat mengatakan:

“Kalau masalah yang dihadapi dalam kegiatan 3R yang disosialisasikan cepatji terbendung karena kami selalu berkordinasi dengan staff kami yang bersangkutan ketika ada masalah sehingga masalah tdersebut dapat terselesaikan.” (Hasil wawancara SN Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Disposisi dapat dipahami bahwa terkait masalah Disposisi kegiatan 3R yang

disosialisasikan selalu cepat terbendung karena pihak UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi permasalahan sehingga masalah tersebut dapat kami selesaikan.

Selanjutnya, wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pelita Harapan mengatakan:

“Disposisi yang dilemparkan kepada staff yang bersangkutan dari UPT sampai saat ini cukup sehingga sosialisasi kegiatan 3R bisa dikatakan belum begitu lancar tetapi kedepannya bisa berjalan dengan paten dan semoga masyarakat bisa bersama-sama memanfaatkan sosialisasi tersebut dan merealisasikannya.” (Hasil wawancara SI Jumat 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Disposisi dapat dipahami bahwa Disposisi yang diberikan kepada staff yang bersangkutan dari UPT cukup sehingga sosialisasi kegiatan 3R dapat dikatakan belum lancar dan diharapkan masyarakat bersama-sama memanfaatkan sosialisasi yang diberikan dan merealisasikan dilingkungannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan Kepala Kelurahan Ballaparang, yang mengatakan :

“untuk mensukseskan kebijakan yang telah ditetapkan, dimana pegawai yang berperan dalam melaksanakan program 3R dalam pengelolaan sampah sudah mengetahui tentang tugas mereka tetapi tidak sekedar tau pegawai juga harus memiliki kemampuannya dalam melaksanakan program 3R ini”. (Hasil wawancara RW Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pegawai yang berperan dalam melaksanakan program juga harus memiliki kemampuan dan tau mengenai program 3R dalam pengelolaan sampah bukan hanya sekedar tau tentang tugas yang diberikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan salah satu warga Kelurahan

Ballaparang, Mengatakan:

“sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti biasa Direktur Bank Sampah Pelita Harapan beserta UPT selalu melakukan keputusan atau tindakan yang baik, baik perintah maupun disposisi kepada keluarahan mengenai program 3R pengelolaan sampah” (Hasil wawancara EY Jumat 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa karakteristik yang terjalin oleh UPT dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan sudah terlihat baik pelaksanaannya dalam menjabarkan tujuan program terhadap masyarakat.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan di atas terkait indikator Disposisi bahwa Pihak Kelurahan disposisikan kegiatan 3R kepada staff yang bersangkutan dengan tidak terlepas dari aturan dan adanya kendala yang bisa terbendung dan terselesaikan. Terkait masalah Disposisi kegiatan 3R yang disosialisasikan selalu cepat terbendung karena pihak UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi permasalahan sehingga masalah tersebut dapat kami selesaikan. Disposisi yang diberikan kepada staff yang bersangkutan dari kelurahan cukup sehingga sosialisasi kegiatan 3R dapat dikatakan belum begitu lancar dan diharapkan masyarakat bersama-sama memanfaatkan sosialisasi yang diberikan dan merealisasikan dilingkungannya. Karakteristik yang terjalin oleh UPT dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan sudah terlihat baik pelaksanaannya dalam menjabarkan tujuan program terhadap masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pasti tidak lepas dari struktur birokrasi. Karena struktur birokrasi adalah karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi secara terus menerus dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala UPT Mengatakan:

“Kegiatan 3R yang dijalankan untuk masyarakat tidak terlepas dari strukturnya memang. Disini kami ada bagian yang menangani kegiatan tersebut dan yang bertugas utamanya bersosialisasi kepada masyarakat.” (Wawancara NA Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Struktur birokrasi dapat dipahami bahwa Kegiatan 3R dijalankan untuk masyarakat, tak terlepas dari struktur yang diberikan tugas untuk menangani kegiatan 3R dalam bersosialisasi kepada masyarakat berdasarkan tujuan 3R.

Selanjutnya, wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Bank Sampah Pusat mengatakan:

“kami selalu berkomunikasi secara intens dengan staff disini dalam Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup tentang cara mengatasi permasalahan sampah dengan cara menggunakan program (3R)” (Hasil wawancara SN Kamis 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Struktur birokrasi dapat dipahami bahwa dalam komunikasi berdasarkan struktur staff yang ada terkait dengan program 3R pengelolaan sampah, secara internal pelaksana program dengan organisasi yang terkait dalam hal ini pihak Kelurahan Ballaparang terus berupaya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens pada

semua para bawahan yang terlibat dalam sebuah program yang ditujukan langsung kepada masyarakat kelurahan ballaparang serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya, wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pelita Harapan mengatakan:

“kerjasama kami dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam struktur birokrasi kegiatan 3R cukup baik kami sama-sama melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya program 3R bahwa sampah yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna.” (Hasil wawancara SI Jumat 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Struktur birokrasi dapat dipahami bahwa melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan Kepala Kelurahan Ballaparang, yang mengatakan :

“dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi disini kami bekerjasama dengan beberapa instansi terkait yaitu dinas lingkungan hidup, bank sampah pusat dan bank sampah pelita harapan yang ada di kelurahan kami”. (Hasil wawancara RW Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kebijakan kerjasama antar organisasi itu penting demi mensukseskan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan salah satu warga Kelurahan Ballaparang, Mengatakan:

“Kegiatan yang dijalankan para birokrasi yaitu sosialisasi kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah yang Sebelum adanya program 3R di Kelurahan ini masyarakat masih sering buang sampah disembarang tempat tapi setelah adanya program 3R ini masyarakat langsung bekerja sama dan sangat mendukung untuk membawa sampah-sampah ke bank sampah unit sekaligus sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EY Jumat, 12 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Kegiatan para birokrasi bersosialisasi kegiatan 3R pengelolaan sampah yang sebelumnya masyarakat masih sering buang sampah disembarang tempat, setelah adanya program 3R ini masyarakat langsung bekerja sama dan sangat mendukung untuk membawa sampah-sampah ke bank sampah unit sekaligus sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan diatas terkait indikator Struktur birokrasi bahwa Kegiatan 3R dijalankan untuk masyarakat, tak terlepas dari struktur yang diberikan tugas untuk menangani kegiatan 3R dalam bersosialisasi kepada masyarakat berdasarkan tujuan 3R. Melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan para birokrasi bersosialisasi kegiatan 3R pengelolaan sampah yang sebelumnya masyarakat masih sering buang sampah disembarang tempat, setelah adanya program 3R ini masyarakat langsung bekerja sama dan sangat mendukung untuk membawa sampah-sampah ke bank sampah unit sekaligus sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

C. Pembahasan

Dalam memandang implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* menanamkan model implementasi kebijakan public dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Pihak UPT melakukan sosialisasi bersama pihak kelurahan dengan Bank sampah tentang pentingnya penjagaan kebersihan lingkungan dalam mengelola sampah utamanya sampah plastik yang telah dipilih dari setiap rumah warga (*Reuse*), dalam sosialisasinya juga dibantu oleh warga yang aktif dalam pengelolaan sampah untuk mengajak warga lainnya agar peduli dalam pengelolaan sampah dan utamanya pentingnya untuk menjaga kebersihan. komunikasi dalam kegiatan *Reduce* cukup baik karena tidak hanya melibatkan lembaga formal tapi juga melibatkan lembaga-lembaga nonformal. Sosialisasi kegiatan *Recycle* harus konsisten untuk dijalankan berdasarkan tujuan yang tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban tapi kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan berguna kepada masyarakat untuk di realisasikan. pelatihan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur kelurahan ballaparang dalam pengelolaan sampah melalui program 3R dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan pelatihan yang diberikan tidak secara berkala dan kurangnya sarana dalam hal tempat penyuluhan program 3R serta kurangnya perangkat aparatur dalam memberikan pelatihan mengenai program 3R, hal tersebut masih kurang Menurut George C.Edwards III dalam Agustino (2016:136-141)

2. Sumberdaya

Dalam meningkatkan kegiatan 3R pihak UPT berupaya sosialisasi dengan tujuan dapat meningkatkan kegiatan tersebut tetapi masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung agar kegiatan 3R berjalan. Kegiatan 3R yang paling diminati dan dapat dikatakan Berhasil direalisasikan masyarakat karena sosialisasi UPT yaitu kegiatan *Recycle*. Pelaksana program mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program. Walaupun terkadang dilapangan masyarakat tidak sedikit yang masih kurang sadar akan kebersihan, pelaksana program tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat sehingga nantinya bisa sadar akan pentingnya keberhasilan program 3R ini. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar dari pelaksana program untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal, hal tersebut belum sesuai dengan George C.Edwards III dalam Agustino (2016:136-141).

3. Disposisi

Pihak UPT disposisikan kegiatan 3R kepada staff yang bersangkutan dengan tidak terlepas dari aturan dan adanya kendala yang bisa terbendung dan terselesaikan. Terkait masalah Disposisi kegiatan 3R yang disosialisasikan selalu cepat terbendung karena pihak UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi permasalahan sehingga masalah tersebut dapat kami selesaikan. Karakteristik yang terjalin oleh UPT dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan sudah terlihat baik pelaksanaannya dalam menjabarkan tujuan program terhadap masyarakat, sesuai dengan George C.Edwards III dalam Agustino (2016:136-141).

4. Struktur birokrasi

Kegiatan 3R dijalankan untuk masyarakat, tak terlepas dari struktur yang diberikan tugas untuk menangani kegiatan 3R dalam bersosialisasi kepada masyarakat berdasarkan tujuan 3R. Melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan para birokrasi bersosialisasi kegiatan 3R pengelolaan sampah yang sebelumnya masyarakat masih sering buang sampah disembarang tempat, setelah adanya program 3R ini masyarakat langsung bekerja sama dan sangat mendukung untuk membawa sampah-sampah ke bank sampah unit sekaligus sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, sesuai dengan George C. Edwards III dalam Agustino (2016:136-141).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah di bank sampah pelita harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar secara umum telah cukup baik namun sepenuhnya belum terlaksana dengan optimal ditinjau dari aspek

1. Komunikasi

Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat kelurahan ballaparang dalam pengelolaan sampah melalui program 3R dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan tidak secara berkala dan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal tempat penyuluhan program 3R serta kurangnya perangkat aparat dalam memberikan pendampingan mengenai program 3R.

2. Sumberdaya

Dalam meningkatkan kegiatan 3R pihak kelurahan berupaya sosialisasi dengan tujuan dapat meningkatkan kegiatan tersebut tetapi masih kurangnya sarana dan prasaran juga mengakibatkan program 3R belum berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 3R yang paling diminati dan dapat dikatakan Berhasil direalisasikan masyarakat karena sosialisasi kelurahan yaitu kegiatan *Recycle*.

3. Disposisi

Pihak kelurahan disposisikan kegiatan 3R kepada staff yang bersangkutan dengan tidak terlepas dari aturan dan adanya kendala yang bisa terbendung dan terselesaikan. Terkait masalah Disposisi kegiatan 3R yang disosialisasikan selalu cepat terbendung karena pihak kelurahan selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi permasalahan sehingga masalah tersebut dapat kami selesaikan. Karakteristik yang terjalin oleh UPT dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan sudah terlihat baik pelaksanaannya dalam menjabarkan tujuan program terhadap masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan para birokrasi bersosialisasi kegiatan 3R pengelolaan sampah yang sebelumnya masyarakat masih sering buang sampah disembarang tempat, setelah adanya program 3R ini masyarakat langsung bekerja sama dan sangat mendukung untuk membawa sampah-sampah ke bank sampah unit sekaligus sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan Implementasi Program *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan.

1. Sebaiknya diharapkan bagi pemerintah khususnya Pihak Kelurahan Ballaparang untuk senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program 3R agar lebih optimal.
2. Diharapkan seluruh aparat dalam hal ini baik perangkat Kelurahan Ballaparang maupun Bank sampah pelita harapan agar lebih meningkatkan antusiasnya dalam melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan program 3R.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustinus, Leo. (2006). *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alex, S. (2012). *Sukses Mengelola Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- AR, Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Bahar, Yul H. (2007). *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: PT Waca Utama Pramesti.
- Browne dan Wildavsky. (2004). (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70).
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. (2003). *Model-model Dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Sistem Penanganan Persampahan*, Jakarta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Islamy, M. Irfan (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Kartini. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menabung Sampah serta Dampak Keberadaan Bank Sampah Gemah Ripah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mazmania, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (2003), *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Parawangi, Anwar. (2011) : *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Sugiyono. Dr. Prof. (2010) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) Edisi Keempat*. Bandung: Alfabeta.

Sumayadi, (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Wahab, A, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winter, Soren C. (2004). *Implementation Perspective: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters B Guy and Pierre, Jon. (2003). *Handbook of Public Administration*: Sage Publications Ltd.

Wulandari, F. (2014). *Evaluasi Prospek Keberlanjutan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Studi Kasus Bank Sampah di Kota Makassar* [Tesis]. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Jurnal :

Khatimah, Husnul. 2018. *Evaluasi Program Pengelolaan Bank Sampah Unit Mawar Merah di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*.

Nanda Setiawan, Yohanes. 2013. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dengan Program 3R Reduce, Reuse, Recycle (Studi Evaluasi Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri PU, No.21/PRT/M/2006/ Di Kelurahan Jember Kidul, Kebonsari, Jember Lor, Kabupater Jember)*.

Tasdir, Narwan Muhammad. 2(016). *Analists Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Makassar.*

Dokumen – Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengolahan Sampah, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Sampah. Makassar: Walikota Makassar.
- Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2014. Tentang pembentukan UPTD pengelolaan daur ulang sampah pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Makassar: Walikota Makassar.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nomor: 0962.05/C-4/11/EX-42/2020 Makassar, 02 September 2020
Lamp: -
Hal: Permohonan Izin Penerbitan

Kepada Y.B.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan

Tempat

Ayatalmu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Meluhurkan Jenggot dan menghormati kepopuleran dan kemendesian yang aktif mahasiswa di sini pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas nama:

Nama: Kiki Firdaus
Sambutan: 1056/11/2019
Skripsi: Implementasi Program 3R (Recycle, Reduce, Reuse) dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Makassar, Kal. Hallapareng, Kecamatan Rappasari Kota Makassar

Untuk itu kami berbesar hati memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna penerbitan dan distribusi buku tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jazakallahu Khairan Kairatan
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Prodi,

Nurulhaq, S.Sos., MPA
NBM 1067463



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +6211-3611007 Faksimili +6211-3611007

Email: Kesbang@makassar.go.id Nomor: 0411-3611007 www.makassar.go.id

Makassar, 06 Oktober 2020

Kepada

Yth. CAMAT RAPOKINI KOTA MAKASSAR

Nomor: 070 / 1759 - EK/BP. X/2020

Sifat:

Perihal:

Izin Penelitian

Dengan hormat,

Membaca Surat dan Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Peluang kepada
Seksi Bantu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6941/S.01/P.TSP/2020 tanggal 02
Oktober 2020. Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak

Nama: KIKI FITRIA
NIM/Jurusan: 105631112510 / Kependidikan
Pekerjaan: Mahasiswa Ilmu Adm. Negara
Alamat: Jl. Khatulistiwa No. 209, Makassar
Judul: IMPLEMENTASI PROGRAM 3R (Reuse, Reduce dan Recycle)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH ELITA
HARAPAN KEL. BULLAPARAN, KEL. RAPOKINI KOTA
MAKASSAR

Bermaksud mengadakan Penelitian pada instansi / Wilayah Bapak dalam
rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
mulai tanggal 05 Oktober s.d 02 Desember 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT UPT PENERBITA Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



I. H. JAMAING, M.Sc
Pembina Pembina Utama Muda
10601231 198003 1 054

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Perencanaan Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar
3. Kepala Prodi. Ilmu Adm. Negara FISIP UNISMJH, Makassar di Makassar
4. Atasan yang bersangkutan
5. Asli



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI

Jalan T. Sjahrir No. 117, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 90211

Makassar, 11 Oktober 2020

T. 0412 444

Bapak Lurah Rappocini

Nomor: 150/REG/2020
Lampiran:
Perihal: Izin Penerbitan

Makassar



IMPLEMENTASI PROGRAM 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) DALAM PENGELOMPOKAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PELITA HAMBARAN KEL. RAPPACINANG, KEC. RAPPACINI KOTA MAKASSAR

H. ISMAIL ABDULLAH S.SIP
Pangkat: Pembina Tk. I
No. 119803174.200412.1.602

- DISTRIBUSI:
- 1. Kepala Badan Nasional Bangsa dan POLITIK Prodi. Sosial di Makassar;
 - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prodi. Sastra di Makassar;
 - 3. Kepala Prodi. Ilmu Adm. Secara FISIP UINISMA di Makassar & Makassar;
 - 4. Mahasisw yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.

**BANK SAMPAH PELITA HARAPAN
KELURAHAN BALLAPARANG KECAMATAN RAPPOCINI**

Makassar 02 Desember 2020

Kepada,

Yth. Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Makassar

Perihal : Keterangan Telah

di-

Melaksanakan Penelitian

Makassar

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6943/s.01/PTSP/2020 tentang izin penelitian atas nama

Nama : KIKI FITRIA

Nim : 105611112516

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Bank Sampah Pelita
Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tanggal 06 Oktober
2020 s/d 02 Desember 2020, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Implementasi
Program 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita
Harapan Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar*".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

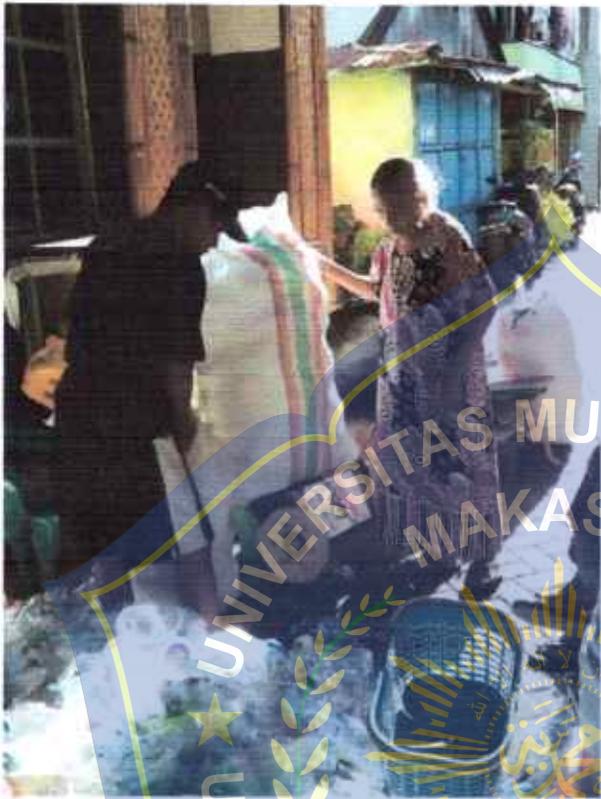




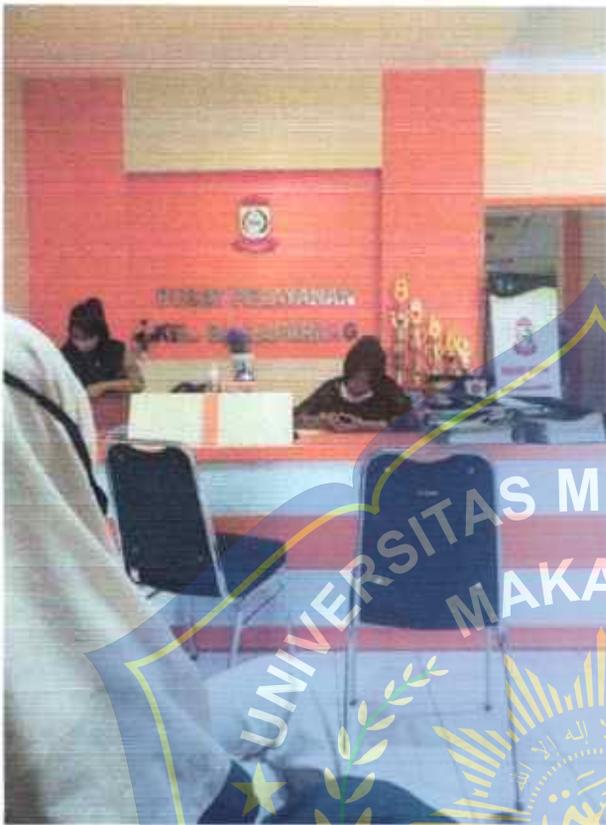














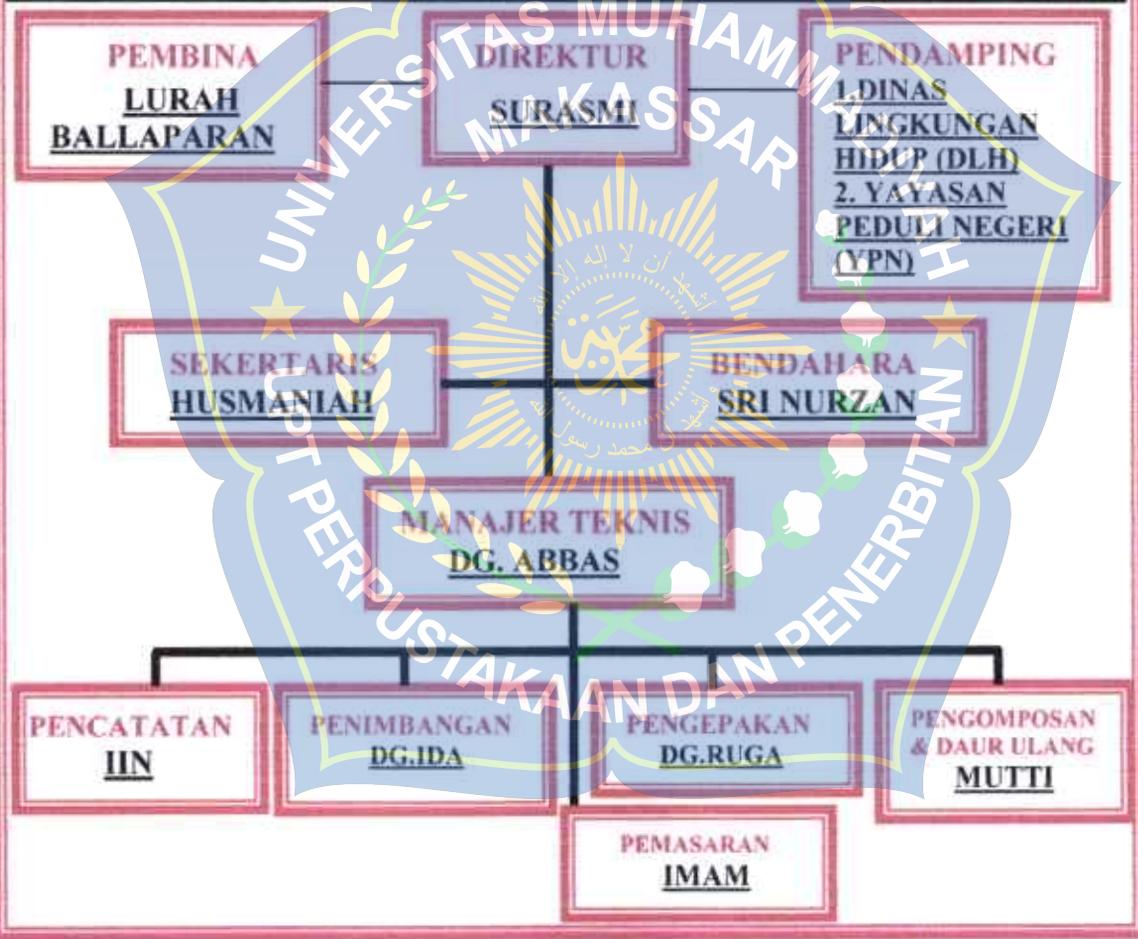


STRUKTUR ORGANISASI

BANK SAMPAH UNIT (BSU)

PELITA HARAPAN

RW : 04
 KELURAHAN : BALLAPARANG
 KECAMATAN : RAPPOCINI
 KOTA MAKASSAR



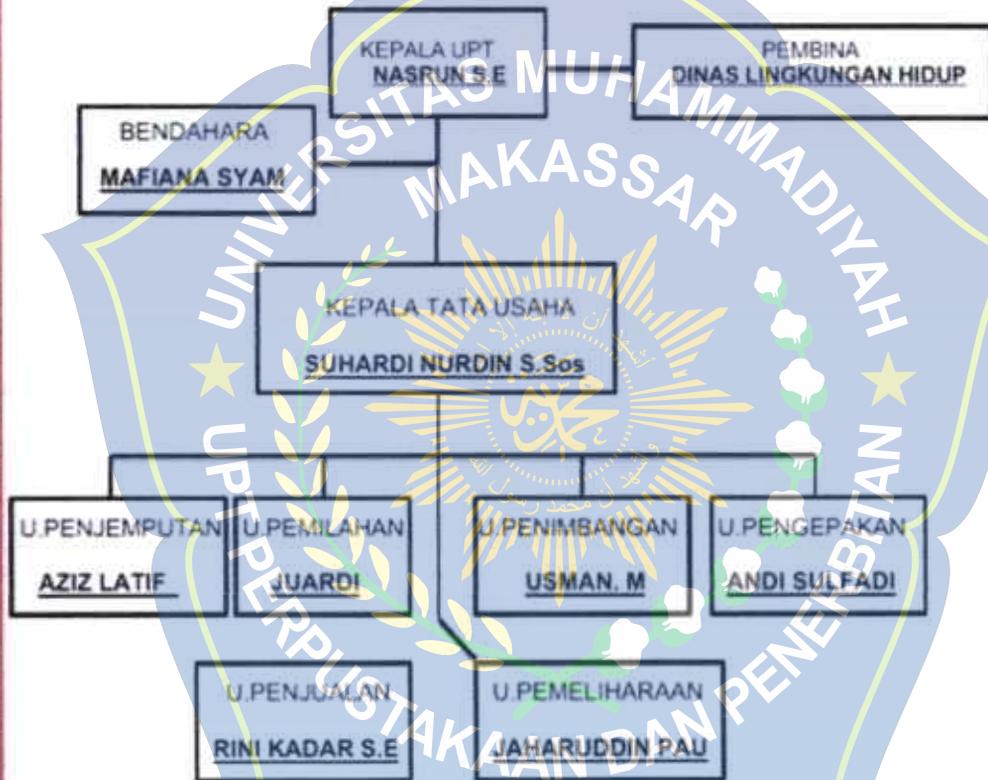


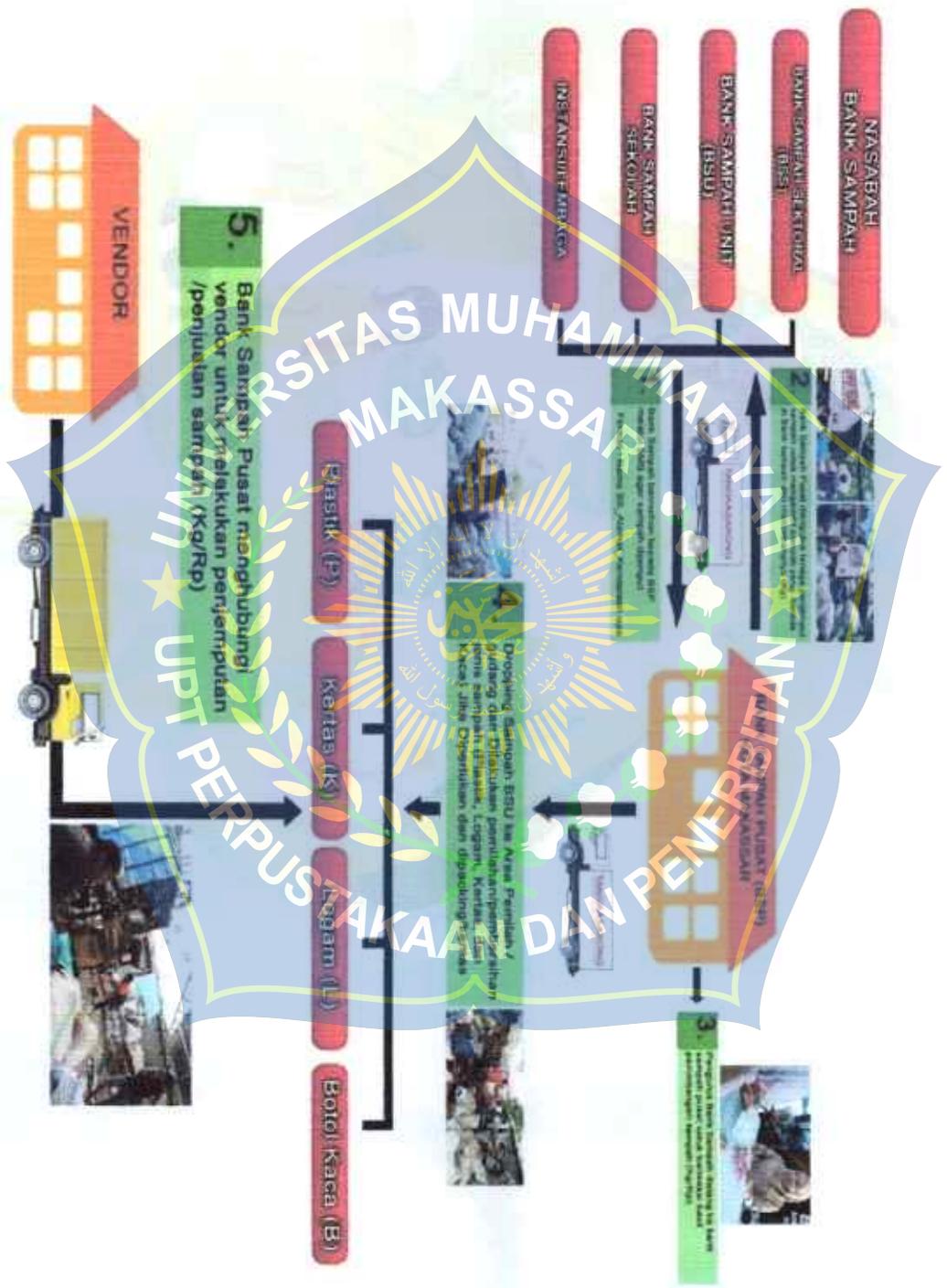
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

STRUKTUR ORGANISASI UPT BANK SAMPAH PUSAT KOTA MAKASSAR



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR





RIWAYAT HIDUP



KIKI FITRIA. Dilahirkan di Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 08 Agustus 1997. Anak kedua dari empat bersaudara. Dari pasangan Bapak Said dan Ibu Tati. Penulis menempuh pendidikan dimuali dari dari SDN 03 Nunukan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya ditahun 2010 melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Nunukan selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 lanjut pada jenjang sekolah menengah kejuruan yaitu di SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan nekad yang kuat dan motivasi dari orang tua dan orang-orang sekitar untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Program *Reuse, Reduce dan Recycle* (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar”**.